



INFORMASI  
LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)

KABUPATEN BONE

TAHUN 2009

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan *"Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat"* Tahun Anggaran 2009 dapat diselesaikan. Penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Tahun 2009 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat adalah merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah yang dimaksudkan sebagai sarana komunikasi dan perekat hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat Kabupaten Bone dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini memuat Dasar Hukum, Gambaran Umum Daerah, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berisi visi dan misi, strategi dan arah kebijakan serta prioritas daerah), Urusan Desentralisasi yang berisi capaian terhadap urusan wajib dan urusan pilihan, dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, serta berbagai prestasi yang mampu diraih selama kurun waktu tahun 2009. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan selama tahun anggaran 2009 telah mampu merealisasikan berbagai program yang diimplementasikan melalui penyelenggaraan 17 Bidang pembangunan, diantaranya peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pemahaman nilai agama dan budaya, pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, pengembangan usaha daerah, pengembangan perdagangan, dan pembangunan koperasi, yang mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bone yang bersumber pada Arah dan Kebijakan Umum Pemerintahan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009.

Namun demikian disadari pula bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah daerah yang belum terlaksana secara optimal, oleh karena itu kami berharap semoga Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) ini dapat menjadi bentuk komunikasi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone kepada masyarakat serta menjadi bahan bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi, fasilitasi dan supervisi serta pembinaan lebih lanjut bagi Pemerintah Daerah khususnya dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat untuk masa-masa yang akan datang.

Watampone, 12 April 2010

**BUPATI BONE,**

**H.A. MUH. IDRIS GALIGO, SH**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Dasar Hukum .....	1
B. Gambaran Umum Daerah.....	3
1. Kondisi Geografis .....	3
a. Ketinggian Tempat.....	1
b. Kemiringan Lereng (Slop Of Mountain) .....	1
c. Kedalaman Tanah ( Depth of Land) .....	2
d. Jenis Tanah ( Type of Land).....	2
e. Iklim (Climate).....	2
2. Gambaran Umum Kondisi Demografis .....	2
a. Jumlah Penduduk .....	2
b. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin ...	3
c. Struktur Usia .....	3
d. Jenis Pekerjaan .....	3
e. Pendidikan .....	5
.....	
.....	
3. Kondisi Ekonomi .....	5
a. Potensi Unggulan Daerah .....	5
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB .....	15
<b>BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>21</b>
A. Visi dan Misi.....	21
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Pembangunan Kabupaten Bone .....	25
1. Strategi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bone.	25
a. Kebijakan Pembangunan Pemerintahan .....	25
b. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia	26

c. Kebijakan Pembangunan Ekonomi .....	27
d. Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya .....	28
e. Kebijakan Pembangunan Penataan Wilayah.....	29
f. Kebijakan Keuangan Daerah .....	30
2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bone ....	30
a. Peningkatan Kualitas Hidup .....	30
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan.....	30
2. Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Mental..	30
3. Peningkatan Pendapatan.....	31
b. Pembangunan Sosial dan Agama.....	31
1. Penanganan Kependudukan.....	31
2. Pembangunan Ketenagakerjaan.....	31
3. Peningkatan Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	31
4. Peningkatan Kualitas Aparatur.....	32
5. Peningkatan perhatian kepada penduduk Usia Lanjut dan Penyandang Cacat.....	32
6. Peningkatan pemahaman nilai Agama dan Budaya.....	32
c. Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan.....	33
d. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi.....	33
e. Pengembangan Usaha Daerah.....	35
f. Pengembangan Perdagangan.....	36
g. Pembangunan Koperasi.....	37
h. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	37
i. Pengelolaan Kelautan dan Pesisir.....	38
j. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan .....	39
k. Pembangunan Perdesaan .....	39
l. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup .....	40
m. Penataan Ruang .....	41

n. Politik, Informasi, Komunikasi Dan Media Massa .....	42
o. Pembinaan Hukum .....	43
p. Pembangunan Perumahan dan Permukiman....	43
q. Keamanan, Ketertiban & Ketentraman Masyarakat.....	44
C. Prioritas Daerah .....	44
a. Bidang Pendidikan .....	44
b. Pembangunan Sosial dan Agama .....	45
c. Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan .....	46
d. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi .....	47
e. Pengembangan Usaha Daerah .....	48
f. Pengembangan Perdagangan .....	48
g. Pembangunan Koperasi .....	49
h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .....	49
i. Pengelolaan Kelautan dan Pesisir .....	49
j. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan.....	50
k. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup .....	50
l. Penataan Tata Ruang .....	50
m. Politik, Informasi, Komunikasi dan Media Massa .....	51
n. Pembinaan Hukum .....	51
o. Pembangunan Perumahan dan Permukiman .....	51
p. Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat .....	52
q. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga .....	52

### **BAB III URUSAN DESENTRALISASI**

A. RINGKASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.....	53
B. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD .....	54
C. Sistematika Penyusunan RKPD .....	55
D. Gambaran Kondisi Umum Kabupaten Bone .....	55

E. Kondisi Perekonomian Kabupaten Bone .....	58
F. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi 2009 .....	58
G. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah .....	59
H. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan .....	65
I. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan .....	73
1. Urusan Pendidikan.....	
73	
2. Urusan Kesehatan.....	90
2.1. Dinas Kesehatan .....	90
2.2. RSUD Tenriawaru .....	98
3. Urusan Lingkungan Hidup.....	
108	
3.1. Badan Lingkungan Hidup Daerah.....	
108	
3.2 Kantor Pengelola Kebersihan, Pertamanan dan Permakaman.....	
111	
4. Urusan Pekerjaan Umum.....	117
5. Urusan Penataan Ruang .....	126
6. Urusan Perencanaan Pembangunan.....	135
7. Urusan Perumahan .....	143
8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	143
9. Urusan Penanaman Modal.....	148
10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah..	151
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	155
12. Urusan Ketenagakerjaan .....	160
13. Urusan Ketahanan Pangan.....	166
14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	169
15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	173

16. Urusan Perhubungan.....	179
17. Urusan Komunikasi dan Informatika.....	182
18. Urusan Pertanahan.....	185
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.....	187
19.1 Badan Kesbangpol dan Linmas.....	187
19.2 Kantor Polisi Pamong Praja.....	194
20. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.....	195
20. 1. Sekretariat DPRD.....	195
20. 2. Sekretariat Daerah.....	201
20.2.1 Bagian Tata Pemerintahan.....	
20.2.2 Bagian Pemerintahan Desa.....	202
20.2.3 Bagian Hukum.....	202
20.2.4 Bagian Keagrariaan .....	202
20.2.5 Bagian Umum dan Protokol .....	203
20.2.6 Bagian Penyusunan Program.....	204
20.2.7 Bagian Ekonomi .....	204
20.2.8 Bagian Kesejahteraan Rakyat.....	205
20.2.9 Bagian Keuangan dan Perlengkapan	205
20.2.10 Bagian Humas.....	209
20.2.11 Bagian Adm. Sumber Daya Alam....	210
20.2.12. Bagian Organisasi.....	210
20.3. Inspektorat Daerah.....	214
20.4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .....	216
20.5. Dinas Pengeloaan Keu. Dan Aset Daerah...	221

20.6. Dinas Pendapatan Daerah.....	216
20.7. Kantor Pemadam Kebakaran.....	220
20.8. UPTP.....	234
20.9. Kecamatan.....	241
20.10 Kantor Penelitian dan Pengembangan.....	239
21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	242
22. Urusan Sosial.....	247
23. Urusan Kebudayaan.....	253
24. Urusan Statistik .....	258
25. Urusan Kearsipan .....	255
26. Urusan Perpustakaan .....	262
<b>C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN</b>	<b>262</b>
1. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	262
2. Urusan Pertanian.....	266
2. 1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	266
2.2. Dinas Peternakan .....	271
3. Urusan Kehutanan dan Perkebunan.....	275
4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	279
5. Urusan Pariwisata .....	283
6. Urusan Perindustrian .....	283
7. Urusan Perdagangan .....	289
8. Urusan Ketrasmigrasian .....	290
<b>BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN</b>	<b>615</b>
A. Kerjasama Antar Daerah.....	615
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.....	615
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah.....	615
D. Pembinaan Batas Wilayah.....	615
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	616
F. Pengelolaan Kawasan Khusus.....	617
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	617
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>621</b>



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Dasar Hukum .....	1
B. Gambaran Umum Daerah.....	3
1. Kondisi Geografis .....	3
2. Gambaran Umum Kondisi Demografis .....	4
3. Kondisi Ekonomi .....	4
a. Pertanian .....	4
b. Perkebunan .....	5
c. Perikanan .....	5
d. Peternakan.....	5
e. Perindustrian.....	5
f. Pertambangan.....	5
g. Pariwisata Dan Hotel .....	6
<b>BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH</b>	
1. Visi dan Misi.....	7
2. Strategi .....	8
3. Kebijakan Dan Prioritas .....	10
a. Bidang Pendidikan .....	10
b. Pembangunan Sosial Dan Agama.....	11
c. Pemerataan pembangunan dan penanggulangan Kemiskinan.....	13
d. Peningkatan Ketahanan Pangan Dan Gizi .....	13
e. Pengembangan Usaha Daerah .....	14
f. Pengembangan Perdagangan.....	14
g. Pembangunan Koperasi.....	15
h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.	16

i. Pengelolaan Kelautan Dan Pesisir.....	16
j. Pembangunan Perkotaan Dan Pedesaan .....	16
k. Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.....	17
i. Penataan Tata Ruang .....	17
m.Politik, Informasi, Komunikasi, dan Media Massa..	18
n. Pembinaan Hukum .....	18
o. Pembangunan Perumahan Dan Permukiman .....	18
p. Keamanan, Ketertiban, Ketemtraman Masyarakat.	19
q. Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga .....	19

### **BAB III URUSAN DESENTRALISASI**

A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan .....	20
1. Urusan Pendidikan.....	20
2. Urusan Kesehatan.....	20
3. Urusan Lingkungan Hidup.....	21
4. Urusan Pekerjaan Umum.....	21
5. Urusan Penataan Ruang .....	22
6. Urusan Perencanaan Pembangunan.....	22
7. Urusan Perumahan .....	22
8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	22
9. Urusan Penanaman Modal.....	23
10. Urusan Koperasi dan UKM.....	23
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	23
12. Urusan Ketenagakerjaan .....	23
13. Urusan Ketahanan Pangan.....	24
14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	24
15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	24
16. Urusan Perhubungan.....	25
17. Urusan Komunikasi dan Informatika.....	25

18. Urusan Pertanahan.....	25
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	25
20. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.....	26
21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	27
22. Urusan Sosial.....	27
23. Urusan Kebudayaan.....	27
24. Urusan Statistik .....	27
25. Urusan Kearsipan .....	27
26. Urusan Perpustakaan .....	28
B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan.....	28
1. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	28
2. Urusan Pertanian.....	28
3. Urusan Kehutanan.....	29
4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	29
5. Urusan Pariwisata .....	29
6. Urusan Industri.....	30
7. Urusan Perdagangan .....	30
8. Urusan Ketransmigrasian .....	30

#### **BAB IV TUGAS PERBANTUAN**

A. Tugas Pembantuan yan diterima.....	31
1. Urusan Kesehatan.....	31
2. Urusan Ketahanan Pangan .....	31
3. Urusan Kehutanan dan Perkebunan .....	31
4. Urusan Pekerjaan Umum.....	32
5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	32
6. Urusan Pertanian .....	32
7. Urusan Ketenagakerjaan .....	33
8. Urusan Kelautan dan Perikanan .....	33

9. Urusan Perindustrian dan Perdagangan .....	33
B. Tugas Pembantuan yang diberikan.....	34
<b>BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN</b>	
A. Kerjasama Antar Daerah.....	35
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.....	35
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah.....	35
D. Pembinaan Batas Wilayah.....	36
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	36
F. Pengelolaan Kawasan Khusus.....	37
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	37
H. Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan.	38
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	39

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, responsif dan akuntabel, maka perlu dibentuk dan dilembagakan sistem manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kerangka itulah Pemerintah Kabupaten Bone melaksanakan sebuah mekanisme pelaporan yang menyeluruh sebagai salah satu bagian dari sistem manajemen, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, serta evaluasi, dan diakhiri dengan pelaporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang tatacara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa laporan yang ada di antaranya adalah: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua laporan tersebut dirangkum dalam sebuah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada masyarakat.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tatacara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10).

## **B. GAMBARAN UMUM DAERAH**

### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Bone atau dikenal sebagai Bumi Arung Palakka adalah salah satu Daerah Otonom dari 23 kabupaten/ kota yang ada di Sulawesi Selatan dan terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berada antara 04° 13" - 05° 06" Lintang selatan dan antara 119° 42" - 120° 306" Bujur Timur dan

memiliki garis pantai yang cukup panjang yakni sekitar 138 km. Kabupaten Bone beribukota Watampone yang berjarak  $\pm$  173 Km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Bone  $\pm$  4.559 Km<sup>2</sup> atau 7,3 % total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Bone terdiri dari 27 Kecamatan, 331 Desa dan 41 Kelurahan. Wilayah Kabupaten Bone secara administratif berbatasan dengan Kabuapten Wajo dan Soppeng di sebelah utara, berbatasan dengan Teluk Bone di sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kabuapten Sinjai dan kabupaten Gowa dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru.

## **2. Gambaran Umum Demografis**

Jumlah penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2009 sebanyak 759.269 jiwa yang terdiri dari laki-laki 362.636 jiwa dan perempuan 396.633 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2009 rata-rata 167 jiwa / km<sup>2</sup>, yang dihuni berbagai etnis yaitu Bugis, Makassar, Toraja, Jawa serta Keturunan Thionghoa. Kehidupan beragam berjalan dengan baik dan penuh dengan rasa toleransi dalam menjalankan ibadah dan kepercayaan masing-masing. Mayoritas masyarakat Bone memeluk agama Islam.

Dilihat dari tingkat pendidikannya, penduduk Kabupaten Bone paling banyak berpendidikan SD dengan jumlah 270.908 orang, tidak tamat SD sederajat sebanyak 196.901 orang, tamat SMP 114.474 orang, tamat SMA 84.434 orang dan tamat akademi / perguruan tinggi sebanyak 33.014 orang.

## **3. Kondisi Ekonomi**

### **a. Pertanian**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan perekonomian Kabupaten Bone. Komoditi tanaman pangan yang potensial dikembangkan adalah padi, palawija dan hortikultura. Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bone tahun 2009 menggunakan tahun dasar 2000, sektor pertanian memberi kontribusi PDRB tertinggi pada tahun 2009 sebesar Rp. 3.202.168.630.

## **b. Perkebunan**

Komoditi perkebunan di Kabupaten Bone sangat beragam dan memiliki potensi dalam jumlah yang cukup besar antara lain kelapa, kakao, jambu mete, cengkeh, kemiri, tembakau, lada, kopi tebu rakyat dan vanili.

## **c. Perikanan**

Sektor perikanan laut maupun tambak sangat berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Bone yang memiliki 138 km garis pantai yang terbentang dari Kecamatan Cenrana sampai dengan Kecamatan Kajuara. Potensi komoditi tersebut antara lain ; udang, kepiting, rumput laut dan Bandeng.

## **d. Peternakan**

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah produsen ternak terbesar di Sulawesi Selatan sehingga ditetapkan sebagai wilayah sentra pengembangan ternak yang meliputi komoditi sapi potong, kerbau, kuda, kambing, ayam buras dan ayam ras.

## **e. Perindustrian**

Salah satu sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat adalah sektor perindustrian baik skala besar, menengah maupun kecil. Sebagian besar kegiatan industri di Kabupaten Bone masih merupakan industri kecil dan menengah, termasuk industri rumah tangga. Usaha tersebut melibatkan masyarakat dengan manajemen dan teknologi sederhana. Jenis industri yang ada diantaranya anyaman Songkok To Bone, pandai besi, industri gula merah, batu bata, mebel dan kerajinan anyaman daun lontar. Sedangkan industri besar yang ada diantaranya Pabrik Gula Camming dan Arasoe, Pabrik Spritus dan industri air mineral di Kecamatan Amali dan Kajuara.

## **f. Pertambangan**

Potensi sumber daya pertambangan di Kabupaten Bone sangat besar dan beragam diantaranya ; batu bara, pasir kwarsa, mangan, tembaga, emas, perak, bijih besi, batu belah, batu kapur, marmer, kaolin, serta sirtu.

#### **g. Pariwisata dan Hotel**

Pariwisata merupakan salah Satu sektor andalan Kabupaten Bone karena disamping merupakan sumber pendapatan asli bagi daerah juga mampu menciptakan lapangan kerja serta dapat menggerakkan sektor perekonomian lainnya seperti pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian dan jasa.

Beberapa obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi baik wisatawan domestik maupun mancanegara antara lain ; Tanjung Pallete, Situs Tana BangkalaE, Makam Raja-Raja Bone, Saoraja Petta Ponggawae, Museum Lapawawoi, Gua Mampu, Gua Janci, Atraksi Maggiri, dan lain-lainnya.

Untuk menunjang kegiatan kepariwisataan tersebut ditunjang dengan keberadaan hotel yang representatif di Kabupaten Bone sebanyak 22 buah dengan jumlah kamar sebanyak 304.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

#### 1. Visi dan Misi

##### a. Visi

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah didasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2008-2013. Visi merupakan tujuan dan Misi merupakan sasaran pembangunan daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone, telah ditetapkan Visi pembangunan yang akan dicapai yaitu “*Bone lebih maju dan berdaya saing dalam tatanan masyarakat religius, berbudaya, mandiri dan demokratis*”.

##### b. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Bone Tahun 2008-2013 maka ditetapkanlah misi sebagai berikut :

1. Memperkokoh peran otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur pemerintah yang baik dan terpercaya serta partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan.
2. Mendorong investasi diberbagai bidang usaha melalui peningkatan/ penyediaan fasilitas dan jasa pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna serta membentuk sistem/jaringan kerjasama dan asosiasi bisnis.
3. Mengembangkan sumberdaya daerah, baik sumberdaya manusia (SDM) melalui pengembangan pendidikan, maupun sumberdaya alam (SDA) terutama komoditas unggulan dalam arti luas dengan prioritas pada agrobisnis.
4. Meningkatkan tatanan demokrasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup yang layak, bermartabat, serta memenuhi tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan.
6. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, dan berwawasan lingkungan.
7. Meningkatkan kualitas kerukunan beragama, pengembangan seni budaya dan pariwisata, peran perempuan, pemuda dan olah raga.
8. Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan yang lebih merata ke seluruh wilayah secara proporsional, termasuk perbatasan, pedalaman, dan terisolir.
9. Mengembangkan sistem informasi dan telekomunikasi secara terpadu yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan keadaan dalam upaya mempromosikan daerah.
10. Memantapkan dan meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **2. Strategi**

Untuk mendukung dan lebih mengkongkritkan penerapan Misi Pemerintah Kabupaten Bone dengan memperhatikan potensi daerah, maka ditetapkan langkah strategi sebagai berikut :

1. Makin mendorong pertumbuhan ekonomi dalam daerah, maksudnya potensi ekonomi dalam wilayah Kabupaten Bone baik pada bagian Barat, Utara, Selatan dan Tengah dapat tumbuh secara bersamaan yang bermuara pada kepentingan masyarakat Bone secara keseluruhan.
2. Penciptaan iklim pemerataan pembangunan antar wilayah, dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi antar wilayah dapat terjadi secara proporsional, maka senantiasa didukung dengan pemerataan kesempatan,

pemerataan dukungan fasilitas, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pemerataan hasil pembangunan.

3. Distribusi kewenangan pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kecamatan, dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan publik daerah yang efisien, efektif yang bermuara pada pemberdayaan aparat pemerintah pada tingkat Kecamatan serta perwujudan dari Konsep Standar Pelayanan Prima (SPM).
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya lokal, dimaksudkan agar nilai-nilai budaya masyarakat Bone yang konstruktif dapat diaplikasikan dalam pembangunan Kabupate Bone.
5. Penciptaan iklim yang kondusif dalam hal pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki, agar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia serta kekayaan sejarah dan budaya Bone termanfaatkan secara optimal dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial budaya serta hukum dan keamanan.
6. Mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan, dimaksudkan agar partai politik, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi usaha dan profesi, badan-badan pemerintah serta unsur kepentingan masyarakat lainnya dapat turut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bone.
7. Swadaya masyarakat, organisasi usaha dan profesi, badan-badan pemerintah serta unsur kepentingan masyarakat lainnya dapat turut serta dalam proses pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bone.
8. Penciptaan iklim kehidupan beragama yang intensif dimaksudkan agar masyarakat bone dalam bingkai religiusitas dapat mengembangkan kehidupan keagamaan secara *cultural educative* dalam berbagai aspek kehidupan.
9. Mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib hukum, agar setiap warga masyarakat memiliki kesadaran hukum, memahami hak-hak

dan kewajibannya serta patuh terhadap segala aturan yang mengikat kehidupan mereka di dalam masyarakat.

10. Menjaga keutuhan Kabupaten Bone sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan sebagai wujud kebersamaan dalam mewarisi sejarah dan budaya masyarakat Bone di masa lalu yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

### **3. Kebijakan dan Prioritas**

#### **a. Kebijakan**

Kebijakan pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2008 -2013 difokuskan pada 6 bidang pembangunan yaitu :

1. Kebijakan Pembangunan Pemerintahan;
2. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
3. Kebijakan Pembanguna Ekonomi;
4. Kebijakan Pembanguna Sosial Budaya;
5. Kebijakan Pembangunan Penataan Wilayah; dan
6. Kebijakan Keuangan.

#### **b. Prioritas**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak seluruh urusan diprioritaskan pencapaiannya. Penentuan prioritas tersebut perlu dilakukan karena banyaknya urusan yang harus ditangani di satu sisi, dan keterbatasan dana yang dimiliki daerah di sisi yang lain.

#### **a. Bidang Pendidikan**

##### **1) Peningkatan Kualitas Pendidikan**

- Menyempurnakan metode serta kurikulum pada seluruh jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
- Meningkatkan daya tampung peserta didik dengan mendayagunakan secara optimal sarana dan prasarana pendidikan sehingga peserta didik dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Memperluas kesempatan belajar bagi anak usia 7-15 tahun, SD dan SMP.

- Mengurangi secara bertahap jumlah anak yang putus sekolah dan menuntaskan masalah pendidikan bagi anak usia 10-14 tahun yang terpaksa bekerja serta meningkatkan kepedulian masyarakat akan hak anak.
- Pemberian kemudahan memasuki sekolah dan hak mengembangkan bakat dan kreativitas.
- Peningkatan mutu, dan kesejahteraan guru serta tenaga pendidikan lainnya terutama di daerah terpencil dan terisolir.

## 2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat

- Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat terutama penduduk miskin.
- Mengembangkan cara penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang edukatif.
- Meningkatkan upaya terpadu untuk makin menjamin kecukupan pangan dan perbaikan gizi.
- Meningkatkan fasilitas olahraga yang terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat.
- Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat terutama penduduk miskin.
- Mengembangkan cara pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien sehingga sesuai dengan keadaan setempat.
- Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

## b. Pembangunan Sosial dan Agama

### 1) Penanganan Kependudukan :

- Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana.
- Meningkatkan keseimbangan penyebaran penduduk melalui penyediaan industri pertanian perdesaan.
- Meningkatkan keterampilan dan pemberian kesempatan kerja
- Memasyarakatkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

### 2. Pembangunan Ketenagakerjaan :

- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
  - Meningkatkan kualitas tenaga kerja.
  - Mendayagunakan tenaga kerja produktif dan mengembangkan kesejahteraan tenaga kerja.
3. Peningkatan Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak :
    - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan latihan.
    - Meningkatkan aksesibilitas dan kontrol yang memungkinkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki dalam berperan serta dalam pembangunan.
  4. Peningkatan Kualitas Aparatur :
    - Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah secara kontinu melalui pendidikan dan pelatihan.
    - Memantapkan peran struktural dan fungsional secara berimbang
    - Melaksanakan penempatan aparat pemerintah secara tepat melalui analisis jabatan untuk mengoptimalkan perannya sebagai pelayan masyarakat.
  5. Peningkatan perhatian kepada penduduk usia lanjut dan penyandang cacat :
    - Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan penduduk usia lanjut dan penyandang cacat melalui pelatihan.
    - Memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum terutama kepada anak-anak.
    - Memberikan kemudahan dan keringanan pelayanan sosial.
    - Memberikan kesempatan atau berperan serta dalam kegiatan pembangunan sesuai kemampuannya.
  6. Peningkatan Pemahaman Nilai Agama dan Budaya :
    - Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada metode pengajaran dengan nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya.
    - Tersedianya sarana ibadah di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, tempat kerja dan tempat umum.

- Meningkatkan peran orang tua, pendidikan keluarga dan masyarakat, pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya.

### **c. Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan**

#### **1. Penanggulangan Kemiskinan :**

- Meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat terutama melalui pengembangan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil.
- Meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan masyarakat
- Kebijakan ekonomi dalam bidang perdagangan, keuangan dan investasi, ketenagakerjaan, industri, usaha untuk mewujudkan peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan.

#### **2. Pengembangan sarana dan prasarana :**

- Pengembangan sarana dan prasarana fisik (Jalan, listrik, pengairan, bersih, kesehatan dan pendidikan), diutamakan yang langsung menyentuh kepentingan golongan masyarakat berpendapatan rendah.
- Pengembangan sarana dan prasarana non fisik (kelembagaan ekonomi dan sosial), masyarakat ditingkatkan secara lebih merata.

### **d. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi**

#### **1. Ketahanan Pangan dan Gizi :**

- Peningkatan produksi dan kualitas beras, juga mencakup pemenuhan kebutuhan bahan pangan lainnya.
- Upaya pemanfaatan sumberdaya pertanian dengan pola pengusahaan yang berorientasi agrobisnis dan lain-lain.

#### **2. Peningkatan Investasi di Bidang Pertanian Pangan :**

- Perluasan areal pertanian pangan yang disesuaikan dengan korelasi tanah, pola tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup.
- Mengembangkan usaha pertanian pangan dengan peran serta aktif petani.
- Perluasan areal pertanian pangan yang didukung oleh pengembangan sarana dan prasarana.

#### **3. Penyuluhan Gizi Masyarakat :**

- Meningkatnya keadaan gizi penduduk

- Mencegah dan penanggulangan masalah gizi melalui penganeekaragaman pola konsumsi pangan.
  - Mengembangkan keanekaragaman makanan tradisional
4. Penanggulangan Masalah Gizi Kurang :
- Penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan
5. Produktivitas dan efisiensi pengelolaan upaya perbaikan gizi :
- Peningkatan jumlah dan mutu tenaga gizi yang professional
  - Peningkatan kegiatan penelitian unggulan di bidang pangan dan gizi
  - Pengembangan penerapan teknologi pangan pasca panen untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan.
  - Mengefektifkan koordinasi berbagai kegiatan upaya perbaikan gizi.

**e. Pengembangan Usaha Daerah**

1. Pengembangan Usaha Daerah
- Pengembangan usaha kecil, informal dan tradisional.
  - Membina dan melindungi usaha kecil, informal dan tradisional serta golongan ekonomi lemah.
2. Pengusaha Menengah dan Kecil Agar Menjadi Tangguh :
- Peningkatan prakarsa, etos kerja dan peran serta di segala bidang kehidupan ekonomi masyarakat.
  - Peningkatan kemampuan kewirausahaan dan manajemen
  - Perluasan akses terhadap faktor produksi termasuk pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal.
3. Menata dan Mengembangkan Kelembagaan Usaha :
- Meningkatkan kemampuan pemupukan dan pemanfaatan modal
  - Mengembangkan sarana dan prasarana pemasaran
  - Meningkatkan kerjasama, keterkaitan, kemitraan usaha dengan koperasi, pengusaha menengah dan Perusda.

**f. Pengembangan Perdagangan**

1. Penyempurnaan prasarana perdagangan :
- Peningkatan dayaguna pelaksanaan pembangunan pasar dan pusat-pusat perdagangan lainnya.

- Penyempurnaan sistem administrasi bidang perdagangan termasuk penyempurnaan peraturan-peraturan yang diperlukan.
2. Peningkatan dan penyempurnaan organisasi dan lembaga pemasaran:
    - Pembinaan organisasi pemasaran dan perdagangan serta peningkatan peranan dan pengembangan lembaga konsumen dan pembinaan kerjasama antara perusahaan daerah dan swasta.
  3. Meningkatkan daya saing dan diversifikasi komoditas ekspor :
    - Meningkatnya produktivitas disektor produksi
    - Menyederhanakan prosedur pengumpulan, pengadaan dengan penyaluran barang
  4. Memperluas pasar barang-barang produksi :
    - Menyelenggarakan dan mengikuti pameran dagang secara kontinyu.
    - Mengembangkan sistem informasi pasar secara terpadu dan meningkatkan kontak-kontak dagang.

**g. Pembangunan Koperasi**

1. Meningkatkan Akses dan Pangsa Pasar :
  - Meningkatkan keterkaitan usaha, kesempatan usaha dan kepastian usaha.
  - Memperluas akses terhadap informasi usaha.
  - Penyederhanaan perizinan serta mengembangkan sistem pelayanan informasi pasar dan distribusi yang memadai.
2. Memperluas akses terhadap sumber permodalan :
  - Meningkatkan jumlah pagu dan jenis pinjaman untuk koperasi
  - Menciptakan berbagai kemudahan untuk memperoleh pembiayaan dan jaminan pembiayaan
  - Mengembangkan sistem perkreditan yang mendukung sesuai dengan kepentingan koperasi pada khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.
3. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen :

- Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan profesionalisme anggota koperasi.
- Terwujudnya tertib organisasi dan tata hubungan kerja yang efektif
- Berfungsinya perangkat organisasi koperasi dan mendorong terwujudnya keterkaitan antar koperasi

#### **h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

##### **1. Pengembangan nilai-nilai iptek :**

- Meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai IPTEK
- Membentuk budaya IPTEK di masyarakat dalam rangka memecahkan masalah pembangunan seperti teknik produksi, ilmu pengetahuan terapan dan lain-lain.

##### **2. Melalui pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan IPTEK :**

- Menumbuhkan kemandirian dan keunggulan produksi daerah

#### **i. Pengelolaan Kelautan dan Pesisir**

##### **1. Meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat petani dan nelayan :**

- Penyempurnaan pola hubungan kerja antara KUD dan nelayan dengan pengusaha.
- Peningkatan hasil tangkapan melalui peningkatan produksi usaha nelayan skala kecil dan tambak.
- Peningkatan produktivitas dan peran serta masyarakat desa pantai.

##### **2. Mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut :**

- Meningkatkan produk dan pelayanan wisata bahari, penyebarluasan informasi fungsi ekosistem laut dan keragaman hayati.
- Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui pemahaman fungsi ekosistem pantai dan keragaman hayati.

#### **j. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan**

##### **1. Pembangunan Perkotaan :**

- Peningkatan kemampuan dan produktivitas kota dan mengembangkan kemampuan pemerintah daerah.
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana perkotaan.
- Mewujudkan lingkungan fisik dan sosial ekonomi perkotaan yang berkualitas dan terpelihara.

2. Pembangunan Perdesaan :

- Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna
- Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan diperdeaan
- Pengembangan sentra produksi dan pemasaran industri pertanian dengan industri rakyat
- Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa

**k. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**

1. Inventarisasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup :

- Penempatan lokasi pembangunan yang tepat dalam pola tata ruang daerah.

2. Pengembangan sumberdaya Air :

- Meningkatkan pencegahan intrusi air laut ke dalam air bawah tanah, terutama pada kawasan padat pembangunan

3. Pengamanan sumberdaya laut dan pesisir :

- Pencegahan kerusakan sumberdaya alam dan memelihara kelestariannya.

**l. Penataan Tata Ruang**

1. Mewujudkan pola tata ruang yang terpadu, serasi, selaras dan seimbang :

- Penggunaan tanah produktif untuk pertanian, kawasan hutan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya dan kawasan lindung dipertahankan fungsi lindungnya.

2. Penataan ruang ditingkatkan agar makin efektif :

- Melengkapi dengan kelembagaan yang kuat serta ditunjang dengan aparat yang mampu dan terlatih

3. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang :

- Melibatkan masyarakat pada tahap tertentu dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Memasyarakatkan rencana tata ruang
- Pembangunan berjalan dalam kerangka tata ruang yang telah disepakati dan ditetapkan.

#### **m. Politik, Informasi, Komunikasi dan Media Massa**

1. Mengembangkan iklim dan budaya politik :
  - Mengaktualisasikan prinsip persamaan, kesetaraan, kebebasan dan keterbukaan yang berbasis pada konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat :
  - Mengembangkan komunikasi politik yang lebih sehat
  - Mewujudkan budaya politik yang kondusif
3. Meningkatkan peranan media massa dan pers :
  - Memerdekakan masyarakat serta mengembangkan kehidupan demokrasi di dalam masyarakat
4. Pengembangan sistem informasi :
  - Meningkatnya sistem informasi di seluruh lapisan masyarakat dan dapat mengakses informasi secara cepat dan akurat

#### **n. Pembinaan Hukum**

1. Pembinaan hukum :
  - Mengembangkan nilai-nilai tradisional yang relevan dengan sistem hukum nasional yang terpadu dan responsif.
  - Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat penyelenggara pemerintah
  - Mengembangkan berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undangan guna mendukung kemandirian lokal.

#### **o. Pembangunan Perumahan dan Permukiman**

1. Pemukiman yang teratur, layak huni, berbudaya, ramah lingkungan dan efisien :

- Pengembangan sistem penyediaan, pembangunan huni layak
- Mengembangkan sistem subsidi hunian bagi masyarakat miskin
- Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan perdesaan yang berlebihan
- Meningkatkan kerjasama investasi dan pelayanan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

**p. Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat.**

1. Pembangunan bidang keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat :
  - Menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum
  - Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat
  - Mengembangkan sistem pengamanan wilayah dengan melibatkan

**q. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.**

1. Pembinaan pemuda dan olahraga :
  - Peningkatan peran serta kepemudaan.
  - Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
  - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
  - Peningkatan peran serta masyarakat dengan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga.

## BAB III

### URUSAN DESENTRALISASI

#### A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

##### 1. URUSAN PENDIDIKAN

Urusan pertama adalah urusan pendidikan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 219.983.774.494,50, realisasi Rp. 188.568.161.145,80 dengan persentase 90,03%.

Pelaksanaan program pendidikan gratis di Kabupaten Bone pada tahun 2009 telah memasuki tahun kedua yang dampaknya telah dirasakan oleh masyarakat terutama oleh siswa dan orang tua siswa yang kurang mampu. Dengan pelaksanaan program ini telah mampu memberikan dampak langsung ke masyarakat antara lain berupa peningkatan angka melek huruf usia 15 tahun ke mencapai 425.836, hal ini menandakan bahwa orang buta aksara di Kabupaten Bone semakin berkurang. Keberhasilan tersebut telah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat berupa **Penghargaan Anugrah Aksara**. Untuk Angka Partisipasi Murni (Apm) SD/MI/Paket C menunjukkan hal yang menggembirakan karena dengan jumlah siswa usia 7-12 tahun, sebanyak 85.764 dari 87.801 orang telah ikut berpartisipasi, capaian keinerjanya mencapai 97,68%, APM pada jenjang SMP/MTS/Paket B tahun 2008 sebanyak 26.217 angka partisipasi meningkat menjadi 28.108 pada tahun 2009. Begitu pula Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/Paket C dari jumlah siswa usia 16-18 tahun pada tahun 2008 sebanyak 12.870 meningkat di tahun 2009 menjadi 16.014 orang. Untuk capaian kinerja Angka Putus Sekolah (APS) mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTS, sampai SMA/SMK/MA capaian kinerjanya untuk semua tingkatan dibawah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah di Kabupaten Bone semakin kecil. Sedangkan untuk Angka Kelulusan untuk semua tingkatan mulai dari SD/MI 98,99% , SMP/MTS 96,28% dan SMA/SMK/MA 97,43. Suatu pertanda bahwa jumlah siswa yang lulus untuk semua tingkatan semakin tinggi.

##### 2. URUSAN KESEHATAN

Urusan kedua adalah urusan kesehatan dilaksanakan oleh 2 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Rumah Sakit

Umum Tenriawaru. Dilaksanakan melalui 30 program dan 92 kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 71.431.158.700,00. Realisasi sebesar Rp. 53.563.548.852,00 dengan persentase rata-rata capaian kegiatan 73,78 %.

Pada tahun 2008 telah mulai dilaksanakan program kesehatan gratis di Kabupaten Bone yang dampaknya telah dirasakan secara luas oleh masyarakat. Salah satu dampak yang dirasakan adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin ke sarana kesehatan dimana pada tahun 2008 sebanyak 123.492 orang, dari jumlah masyarakat miskin yang ada sebanyak 137.214 orang, sedangkan pada tahun 2009 kunjungan pasien miskin sebanyak, 100.632 atau menurun 18,5 persen. Menurunnya kunjungan pasien miskin ke sarana kesehatan merupakan bukti layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin semakin efektif yang menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat miskin semakin baik.

### **3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan ketiga, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Dan Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman Kabupaten Bone dengan 11 program dan 30 kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata sebesar 93,90%, alokasi dana sebesar Rp. 5.605.489.800,00, realisasi Rp. 5.267.893.239,00.

Dampak yang dirasakan secara langsung bagi masyarakat, khususnya yang berada di kota watampone adalah pengangkutan sampah warga ke tempat pembuangan akhir yang semakin lancar, dengan asumsi bahwa volume sampah yang ada di dalam kota watampone pada tahun 2009 sebesar 368,70 meter kubik dan dapat ditangani 360 meter kubik atau mencapai 99,80 persen. Dan pada tahun 2009 lalu, kita berhasil meraih penghargaan di bidang kebersihan yakni **Piala Adipura Untuk Kategori Kota Sedang.**

### **4. URUSAN PEKERJAAN UMUM**

Urusan keempat, adalah urusan pekerjaan umum, yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, melalui 16 program dan 46

kegiatan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 103.388.382.327,00, realisasi keuangan Rp. 80.219.743.406,00. Program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain pembangunan jalan, pembangunan jembatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, pembangunan jalan dan jembatan perdesaan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta pemberdayaan petani pemakai air.

## **5. URUSAN PENATAAN RUANG**

Urusan kelima adalah urusan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan dengan capaian kinerja sebesar 71,66 %. Dari 44 kegiatan dengan 19 program dengan alokasi dana sebesar Rp. 18.957.495.624,00 dengan realisasi keuangan Rp. 13.584.503.157,00. Dampak yang dicapai pada urusan ini dapat dilihat pada luas ruang terbuka hijau 7.014.420 hektar dari luas wilayah ber hpl/hgb 23.381.400 hektar atau sekitar 30 persen . Program yang dilaksanakan antara lain pengawasan pemanfaatan ruang, pembangunan saluran drainase, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin.

## **6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Urusan keenam, adalah urusan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Statistik. Melaksanakan 12 program dan 38 kegiatan dengan persentase sebesar 59,23%. Alokasi dana untuk urusan ini sebesar Rp. 5.055.034.850,00. Dengan realisasi keuangan Rp.2.994.135.293,00.

## **7. URUSAN PERUMAHAN**

Urusan ketujuh adalah urusan perumahan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan yang juga melaksanakan **URUSAN PENATAAN RUANG**, dengan capaian kinerja sebesar 71,66 %. Dari 44 kegiatan dengan 19 program dengan alokasi dana sebesar Rp. 18.957.495.624,00 dengan realisasi keuangan Rp. 13.584.503.157,00.

## **8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Urusan kedelapan, adalah urusan kepemudaan dan olah raga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Bone dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.375.796.300, realisasi Rp. 1.848.016.352,00. melaksanakan 6

program dan 24 kegiatan. dampak yang dirasakan langsung masyarakat pada urusan ini adalah bertambahnya lapangan olah raga. Di tahun 2009, ada 1.298 lapangan olah raga di Kabupaten Bone atau meningkat 30,66 persen dari tahun 2008 sebanyak 900 lapangan olah raga.

## **9. URUSAN PENANAMAN MODAL**

Urusan kesembilan adalah urusan penanaman modal. Untuk urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Promosi Dan Penanaman Modal Kab. Bone yang melaksanakan 4 program dan 9 kegiatan, program tersebut antara lain peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan pengembangan modal, penyelenggaraan pameran investasi serta peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. Alokasi dana Rp. 569.381.500,00 dengan realisasi Rp. 311.936.000,00.

## **10. URUSAN KOPERASI DAN UKM**

Urusan kesepuluh adalah urusan koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Dan UMKM. Alokasi dana sebesar Rp. 2.026.484.900,00 realisasi Rp. 1.816.741.795,00. Terdapat 5 program dengan 15 kegiatan yang dilaksanakan. Dampak dari urusan koperasi dapat dilihat dari jumlah koperasi yang ada sebanyak 889 pada tahun 2009 yang aktif sebanyak 752 meningkat dibanding tahun 2008 yang memiliki jumlah koperasi aktif sebanyak 746 dari jumlah koperasi sebanyak 879.

## **11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Urusan kependudukan dan catatan sipil adalah urusan kesebelas dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan alokasi dana Rp. 2.554.793.954,00. Realisasi keuangan Rp. 1.862.982.032,00. Melaksanakan sebanyak 4 program dengan 13 kegiatan. Untuk urusan ini melaksanakan satu program inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik yaitu pembebasan biaya akta kelahiran dan salinannya untuk usia 0-12 tahun yang sudah berlangsung 3 tahun.

## **12. URUSAN KETENAGAKERJAAN**

Urusan keduabelas, adalah urusan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bone, melaksanakan 5 program dengan 16 kegiatan. Alokasi dana Rp. 2.691.308.899,00, realisasi Rp.2.207.912.286,00. Dari urusan ini diperoleh gambaran tentang kondisi

ketenagakerjaan di Kabupaten Bone dimana pada tahun 2009 ada sekitar 1.423 pencari kerja yang mendaftar. Pada tahun 2009 jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SLTA dan Sarjana sebanyak 5.991 orang.

### **13. URUSAN KETAHANAN PANGAN**

Urusan ketahanan pangan, adalah urusan ketigabelas, urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bone dengan alokasi dana Rp. 616.522.009,00, realisasi Rp. 461.445.341,00 terdapat 3 program dan 12 kegiatan. Program yang dilaksanakan antara lain adalah program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan. Capaian kinerja dari ketahanan pangan yang patut dilaporkan adalah terbitnya regulasi berupa Keputusan Bupati Bone Nomor 615 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone. Capaian kinerja yang patut juga dilaporkan dari urusan ketahanan pangan adalah adanya ketersediaan bahan pangan utama tahun 2009 sebesar 546,327 kg/jiwa.

### **14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Urusan keempatbelas, adalah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan 5 program dengan 15 kegiatan, alokasi dana Rp. 898.736.000,00, realisasi keuangan Rp.674.566.000,00,-. Program yang dilaksanakan urusan ini antara lain adalah penguatan kelembagaan PUG dan anak, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, revitalisasi panduan GSI tingkat Kabupaten Bone, keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan serta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Dampak yang dapat dirasakan adalah peningkatan angka melek huruf perempuan usia di atas 15 tahun sebanyak 236.500 orang, dari jumlah 307.148 anak perempuan usia di atas 15 tahun dengan capaian kinerja 77%.

### **15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah urusan kelimabelas dilaksanakan oleh Badan KB dan KS, melaksanakan 10 program dan 29 kegiatan dengan alokasi dana Rp. 6.710.106.175,00, realisasi Rp. 5.741.139.962,00 untuk urusan KB dan KS, dapat dilaporkan prevalensi peserta KB aktif, pada tahun 2009 jumlah peserta program KB aktif sebanyak 21.741

orang dengan jumlah pasangan usia subur 110.493 orang, sehingga capain kinerjanya sebesar 64,93%.

## **16. URUSAN PERHUBUNGAN,**

Urusan keenambelas, merupakan urusan perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Bone dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.500.048.700,00 realisasi keuangan Rp. 3.356.271.527,00. Urusan ini dilakukan melalui 4 program dan 4 kegiatan antara lain adalah program peningkatan pengelolaan prasarana lalu lintas angkutan jalan dengan kegiatan pembuatan marka jalan dan pengadaan lampu jalan. Pada urusan ini kita patut bersyukur karena untuk kelima kalinya di tahun 2009 kita meraih penghargaan di bidang tertib lalu lintas yaitu **Piala Wahana Tata Nugraha**.

## **17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Urusan wajib selanjutnya adalah urusan komunikasi dan informatika yang merupakan urusan ketujuhbelas. Untuk urusan ini dilaksanakan oleh Bagian Humas Dan Infokom Setda Kab. Bone. Melaksanakan 2 program dengan 4 kegiatan. Alokasi dana sebesar Rp. 1.130.350.000, dengan realisasi keuangan Rp. 988.410.000,00. Capaian dari urusan ini yaitu terselenggaranya pameran/ expo pembangunan tiap tahun, dimana informasi tentang hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama ini, dapat diakses langsung oleh masyarakat.

## **18. URUSAN PERTANAHAN**

Urusan kedelapanbelas adalah urusan pertanahan yang kewenangannya masih di Pemerintah Pusat dan belum diotonomikan, untuk Kabuapten Bone dilaksanakan oleh Bagian Keagrariaan Setda Kab. Bone dengan senantiasa berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kab. Bone, alokasi anggaran sebesar

Rp. 2.537.820.000,00, realisasi keuangan Rp. 1.516.724.200,00, melaksanakan 3 program dengan 7 kegiatan. Hal lain yang dapat dilaporkan dari urusan ini adalah penyelesaian kasus tanah negara di mana pada tahun 2009 terdapat 25 kasus yang terdaftar dan dapat diselesaikan sebanyak 21 kasus.

## **19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

Urusan kesembilanbelas adalah urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Linmas serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi dana Rp. 7.412.717.574,00 realisasi keuangan Rp. 7.237.187.982,00. Urusan ini melaksanakan 10 program dan 21 kegiatan, hal-hal yang perlu dilaporkan dari urusan ini adalah adanya kegiatan pembinaan terhadap Ormas, LSM, dan OKP dan pembinaan terhadap partai politik di daerah ini.

Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah sampai saat ini memiliki personil sebanyak 338 orang, sehingga dengan demikian rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk adalah 5 orang/10.000 dari jumlah penduduk 759.269 jiwa. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain pengamanan tempat-tempat vital milik pemerintah, penegakan perda di bidang kemandirian dan ketertiban masyarakat terutama yang terkait dengan permasalahan penyakit masyarakat (pekat).

## **20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DESA, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN**

Urusan pemerintahan umum merupakan urusan kedua puluh yang dilaksanakan oleh 10 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Kantor Pemadam Kebakaran, Unit Pelayanan Terpadu Perizinan, Kecamatan Dan Kantor Penelitian Dan Pengembangan dengan alokasi dana Rp. 380.286.906.742,28. Dengan realisasi Rp. 344.496.759.474,20. Beberapa keberhasilan dalam urusan pemerintahan umum antara lain terselenggaranya pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden secara aman dan demokratis. Pada tahun 2009 pemerintah Kabupaten Bone ditetapkan sebagai kabupaten yang memiliki kinerja terbaik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik tingkat provinsi dan penghargaan “**Citra Bhakti Abdi Negara**” dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Perlu juga disampaikan pada kesempatan ini capaian kinerja dari urusan pemerintahan umum, yaitu adanya perubahan status dari desa menjadi kelurahan yaitu Desa Pompanua dan Desa Pompanua Riattang menjadi Kelurahan Pompanua dan Kelurahan Pompanua Riattang.

## **21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Urusan kedua puluh satu adalah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bone, dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.518.169.850,00 realisasi keuangan Rp. 1.624.844.022,00. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis masyarakat, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan kemiskinan daerah serta pelatihan manajemen keterampilan BUMDES.

## **22. SOSIAL**

Selanjutnya urusan sosial yang merupakan urusan kedua puluh dua, urusan ini dilaksanakan Dinas Kesejahteraan Sosial, alokasi dana Rp.1.912.057.900,00 realisasi keuangan Rp. 1.799.704.438,00. Terdapat 9 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan. Pada urusan sosial hal yang sangat menonjol adalah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), untuk tahun 2009 dari 37.427 jumlah PMKS, yang dapat ditangani/diberi bantuan sebanyak 45 PMKS. Kurangnya penanganan penyandang (PMKS) disebabkan ketersediaan dana yang sangat terbatas.

## **23. URUSAN KEBUDAYAAN**

Urusan kedua puluh tiga adalah urusan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. Alokasi dana sebesar Rp. 2.537.973.696,00 dengan realisasi Rp 2.207.750.850,00. Melaksanakan 7 program dan 19 kegiatan. Capaian kinerja pada urusan ini adalah terselenggaranya sebanyak 3 kali festival seni dan budaya pada tahun 2009, sekaligus memperkenalkan seni dan budaya Kabupaten Bone kepada daerah lain.

## **24. URUSAN STATISTIK**

Urusan kedua puluh empat adalah urusan statistik yang kewenangannya masih di Pemerintah Pusat dan belum diotonomikan, untuk Kabuapten Bone dilaksanakan oleh BAPPEDA dan Statistik Kab. Bone dengan senantiasa berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kab. Bone.

## **25. URUSAN KEARSIPAN**

Urusan kearsipan merupakan urusan kedua puluh lima yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip Dan PDE, dengan melaksanakan 7 program. Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 2.077.502.700,00 dengan realisasi Rp. 1.881.056.298,00.

## **26. URUSAN PERPUSTAKAAN**

Urusan Perpustakaan adalah urusan kedua puluh enam. Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip, dan PDE yang juga melaksanakan urusan Kearsipan. Pada urusan Perpustakaan hal yang dapat menyentuh langsung ke masyarakat adalah dengan tersedianya perpustakaan daerah yang memiliki 4.827 koleksi judul buku dengan jumlah buku sebanyak 10.267 eksemplar. Jumlah kunjungan pada tahun 2009 sebanyak 4.165.

### **PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN**

#### **1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Urusan pertama yaitu urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bone yang dilakukan melalui 8 program dengan 11 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 7.913.227.433,00 realisasi keuangan Rp.7.183.568.990,00, dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata 49,67. Dapat dilaporkan dari urusan perikanan, pada tahun 2009 jumlah produksi ikan sebanyak 119.723,90 ton. Hal lain yang perlu disampaikan sehubungan dengan urusan ini adalah penghargaan "**Adibakti Mina Bahari**" dari Menteri Kelautan Dan Perikanan sebagai juara III (tiga) Tingkat Nasional Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di bidang pelestarian lingkungan sumber daya ikan. Juara I (satu) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dibidang Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

#### **2. URUSAN PERTANIAN**

Urusan kedua adalah urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Peternakan. melaksanakan 7 program dengan 19 kegiatan, alokasi dana sebesar Rp. 8.709.293.618,00. realisasi Rp.7.812.519.779,00. dampak dari urusan pertanian adalah adanya produktivitas padi yang mencapai 808.780 ton per hektar dari luas panen padi 139.920 hektar, meningkat dibanding tahun 2008 dengan produktifitas 764.813 ton per hektar dari luas panen padi 130.503 hektar atau

meningkat 16,76 persen. Dan pada tahun 2009 kita mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden berupa **Penganugerahan Satya Lencana Pembangunan Pertanian di bidang Peningkatan Produksi Beras Nasional**.

Dinas Peternakan melaksanakan 7 program dan 16 kegiatan, alokasi dana sebesar Rp. 5.272.468.600,00 realisasi Rp. 4.587.525.367,00. Hal yang perlu dilaporkan dari urusan ini pada tahun 2009 kelompok Tani Tunas Harapan Desa Melle berhasil menjadi **Juara II Tk. Provinsi**.

### **3. URUSAN KEHUTANAN**

Urusan kehutanan dan perkebunan sebagai urusan ketiga yang dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Melaksanakan 11 program, dan 16 kegiatan dengan alokasi dana Rp. 8.987.593.500,00. Realisasi keuangan Rp. 8.206.093.009,00. Dari urusan ini hal-hal yang perlu dilaporkan adalah rehabilitasi hutan dan lahan kritis, Pada tahun 2009, terdapat 7.762 hektar hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi dari 145.053 hektar total hutan dan lahan kritis, sementara ada 15.270 hektar kerusakan kawasan hutan, hal ini mengalami penurunan sangat signifikan dibanding tahun 2008 dimana terdapat 102,40 hektar kerusakan hutan, dari 145.053 hektar luas kawasan hutan. Di samping itu sejalan dengan Hari Menanam Nasional dan Program Sulawesi Selatan GO GREEN, sampai saat ini telah dilakukan penanaman pohon sebanyak 150 ribu batang di Kabupaten Bone antara pemerintah daerah, DPRD serta masyarakat.

### **4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Urusan keempat adalah urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Alokasi dana sebesar Rp. 1.973.898.400,00, realisasi keuangan Rp. 1.949.557.680,00. Melaksanakan 5 program dan 8 kegiatan. Pada urusan energi dan sumber daya mineral pada tahun 2009, terdapat 2,5 hektar luas penambangan liar yang ditertibkan, dari luas total penambangan liar 5,5 hektar, 3 hektar penambangan liar masih dalam proses penertiban.

### **5. URUSAN PARIWISATA**

Urusan Pariwisata di Kabupaten Bone dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata yang juga melaksanakan urusan wajib kebudayaan. Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Wajib yang dapat dicapai pada urusan Pariwisata antara lain: kunjungan wisatawan di Kabupaten Bone pada tahun 2009 baik itu

wisatawan asing maupun domestik sebanyak 905.183 orang. Sedangkan kontribusi PDRB dari sektor pariwisata sejumlah pada tahun 2009 adalah Rp. 42.353,240.

## **6. URUSAN INDUSTRI**

Urusan keenam adalah urusan perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang juga melaksanakan urusan perdagangan. Jumlah dana yang dialokasikan Rp. 3.828.872.470,00 dengan realisasi Rp.2.886.941.963,00. Melaksanakan 12 program dan 32 kegiatan. Keegiatannya antara lain monitoring bahan kebutuhan pokok, pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klater industri serta membangun jejaring dengan eksportir. Kontribusi PDRB dari urusan perindustrian adalah Rp. 447.620.970 dan urusan perdagangan adalah Rp. 457.714.160.

## **7. URUSAN PERDAGANGAN**

Urusan ketujuh adalah urusan perdangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang juga melaksanakan urusan industri yang telah dipaparkan sebelumnya.

## **8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN**

Urusan kedelapan adalah urusan transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga melaksanakan urusan wajib ketenagakerjaan. Program yang dilaksanakan untuk urusan ketransmigrasian diantaranya adalah program pengembangan wilayah transmigrasi dengan kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi serta penyiapan tenaga kerja siap pakai.

Untuk urusan pilihan transmigrasi yang menjadi indikator kinerja utama adalah adanya transmigran swakarsa, Kabupaten Bone sampai pada tahun 2009 belum ada transmigran swakarsa.

## BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

### A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

#### 1. URUSAN KESEHATAN

Pemerintah Kabupaten Bone tahun anggaran 2009 pada urusan kesehatan mendapatkan kegiatan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang berfokus pada program upaya kesehatan perorangan dengan kegiatan pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan rujukan. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan APBN (Kementerian Kesehatan) Rp. 2.920.500.000

#### 2. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Pelaksanaan tugas pembantuan urusan ketahanan pangan diperoleh dari Kementerian Pertanian dengan program Peningkatan Ketahanan Pangan dan kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dengan jumlah dana APBN Rp. 401.200.000 dan terealisasi 100%.

#### 3. URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pelaksanaan tugas pembantuan urusan kehutanan dan perkebunan diperoleh dari instansi :

1. Ditjen Perkebunan Kementrian Pertanian
2. Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian

##### Program dan Kegiatan

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
  - Kegiatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian  
Jumlah dana Rp. 530.000.000,- Realisasi Rp. 530.000.000,-  
Dan fisik 100 %
- b. Program Peningkatan Kesejahteraan Pangan
  - Kegiatan Penerapan dan pematapan prinsip Good Governance  
Jumlah dana Rp. 495.000.000,- Realisasi Rp. 495.000.000,-  
dan fisik 100 %
- c. Program Pengembangan Agribisnis
  - Kegiatan Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat Jumlah dana  
Rp. 495.000.000,- Realisasi Rp. 495.000.000,- dan fisik 100 %

#### **4. URUSAN PEKERJAAN UMUM**

Tugas pembantuan untuk urusan pekerjaan umum didapatkan dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia dengan program :

1. Program : Pembangunan Jalan

Kegiatan : EIRTP-2 (Pembangunan Jalan Kabupaten Bone) Rp. 15.000.000.000,- realisasi keuangan Rp. 14.762.211.999,- dan fisik 98,41 %

2. Program : Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.

Kegiatan : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rp.4.790.683.000,- realisasi keuangan Rp. 4.728.683.000,- dan fisik 98,70 %

3. Program : Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kegiatan : 1. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (PIIP) Rp.7.250.000.000,- Realisasi keuangan Rp. 7.250.000.000 dan fisik 100 %.

2. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur (PISEW) Rp. 20.000.000.000,- Realisasi Keuangan Rp. 20.000.000.000,- dan fisik 100%

#### **5. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Tugas Pembantuan dari urusan pemberdayaan masyarakat diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Ditjen PMD dengan program Pengentasan Kemiskinan dan kegiatannya adalah Bantuan Langsung Masyarakat dengan anggaran APBN sebesar Rp. 12.367.140.000 dan realisasi 100 %.

#### **6. URUSAN PERTANIAN**

Tugas pembantuan untuk urusan pertanian di berikan oleh Departemen Pertanian. Realisasi program dan kegiatannya adalah :

Kegiatan : - Pengembangan Kesejahteraan Petani jumlah dana Rp.5.157.399.000,- realisasi keuangan Rp. 1.505.795.525,- dan fisik 64,38 %

- Peningkatan Tanaman Pangan, jumlah dana Rp. 6.730.250.000,- realisasi keuangan Rp. 6.355.250.000,- dan fisik 94,42 %

- PLA jumlah dana Rp.3.561.850.000,- Realisasi keuangan Rp. 1.380.102.500 dan fisik 38,74 %.

## **7. URUSAN KETENAGAKERJAAN**

Tugas pembantuan untuk urusan ketenagakerjaan diberikan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan program, kegiatan dan realisasi sebagai berikut :

1. Program : Perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja  
Jumlah anggaran Rp.186.985.000,-  
Realisasi Keuangan dan Fisik 100 %
2. Program : Pemberian dorongan dan penyempurnaan pelaksanaan negosiasi Bipartit  
Jumlah anggaran Rp.140.000.000,-  
Realisasi Keuangan Fisik 100 %
3. Program : Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja  
Jumlah anggaran Rp.316.682.000,-  
Realisasi Keuangan Rp.313.540.500,- dan Fisik 99,01 %

## **8. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Tugas pembantuan untuk urusan kelautan dan perikanan merupakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan dan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bone dengan Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan dan kegiatannya Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir dengan jumlah dana APBN sebesar Rp. 926.300.000 serta realiasi Rp. Rp. 926.250.000,- atau 99,99 %.

## **9. URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Untuk tugas pembantuan dari urusan perindustrian dan perdagangan yang merupakan pendelegasian dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bone dengan program dan kegiatan :

### **1. Pengembangan IKM**

Kegiatan : - Pengadaan Mesin Pengolahan Gula Semut

Jumlah dana sebesar Rp. Rp. 700.000.000,-

Realisasi keuangan Rp. 676.200.000 (96,6%) dan fisik 100%

2. Program : Peningkatan Evaluasi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan : - Pembangunan Gudang 2 (dua) unit di Kec. Dua Boccoe

- Jumlah dana Rp. Rp. 6.000.000.000,-

- Realisasi keuangan Rp. 5.811.600.000 (96,86) dan fisik 100 %

3. Program : Peningkatan Evisiensi Perdagangan

Kegiatan : - Pembangunan Pasar Tradisional/Percontohan di Kec. Tellu Siattinge.

- Jumlah dana Rp. Rp. 2.500.000.000,-

- Realisasi keuangan Rp. 2.377.750.000 (95,11) dan fisik 100

## **B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**

Untuk tahun 2009 belum ada tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bone.

## BAB V

### TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

#### A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah tahun anggaran 2009 di Kabupaten Bone belum ada.

#### B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga selain dalam bentuk barang dan jasa pada tahun 2009 tidak ada.

#### C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

##### 1. Forum Koordinasi :

- Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB)
- Forum Koordinasi Deteksi Dini Masyarakat (FKDM)

##### 2. Materi Koordinasi

- a. Stabilitas keamanan dan keterlibatan masyarakat.
- b. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang kondusif di masyarakat.
- c. Masalah Strategi Masyarakat Daerah (Mastrada)
- d. Deteksi Dini Masyarakat
- e. Kominda

##### 3. Instansi vertikal yang terlibat antara lain:

- 1. Korem 141 Toddopuli
- 2. Polwil Bone
- 3. Pengadilan Negeri Bone
- 4. Kejaksaan Negeri Watampone
- 5. Polres Bone
- 6. KPU ( Non Departemen
- 7. Departemen Agama (Depag)
- 8. Kantor BASARNAS Watampone
- 9. BMKG Wil. IV

##### 4. Sumber dana dari APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2009.

##### 5. Jumlah Dana

- Mastrada : Rp. 257.491.500,00

- Deteksi Dini	: Rp. 19.244.000,00
- Kominda	: Rp. 83.740.475,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 360.475.000,00

6. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan, tetapi sewaktu-waktu bisa dilaksanakan dalam keadaan tertentu.

7. Hasil dan manfaat koordinasi

- Terciptanya suasana kondusif masyarakat
- Keamanan dan ketertiban terkendali
- Terciptanya kerukunan umat beragama pada masyarakat.

8. Tindaklanjut hasil koordinasi yaitu rapat Muspida dan instansi terkait.

9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan yaitu kondisi kekinian sosial masyarakat yang sewaktu-waktu bisa berubah antara lain :

- meningkatnya masyarakat miskin
- tingkat pengangguran bertambah

Sehingga kedua hal tersebut dapat memicu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dianggap perlu untuk dilaporkan dan mencari solusi yang terbaik.

#### **D. Pembinaan Batas Wilayah**

Sengketa Batas Daerah : Masih ada titik-titik tertentu yang belum dicapai kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng terletak di Desa Ulaweng Riaja dan Desa Abbanuange, dengan Kabupaten Barru terletak di Desa Tondong dan Desa Gattareng.

1. Upaya yang telah dilakukan :

- Telah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Pemerintah daerah Soppeng, tetapi belum menghasilkan kesepakatan. Demikian pula terhadap Pemerintah Daerah Barru;
- Telah disampaikan permohonan fasilitasi kepada Pemerintah Provinsi untuk penyelesaian masalah tersebut. Hingga saat ini belum ada kejelasan dan untuk sementara dibekukan.

#### **E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

1. Bencana yang terjadi

a. Bencana Banjir

Penanggulangannya, yaitu :

1. TRC (untuk mendata kerugian dan jumlah korban)
2. Menurunkan Tim Rescue (Satgas Penanggulangan Bencana)
3. Suplai bantuan
4. Rekonstruksi
5. Rekondisi

## 2. Status Bencana yaitu Lokal

Status bencana yang terjadi merupakan Bencana Lokal.

## 3. Sumber, dan jumlah anggaran

- a. Jumlah anggaran : Rp. 235.653.750,00
- b. Sumber dana : APBD

## 4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

- Sosialisasi tentang penanggulangan bencana (arti pentingnya kewaspadaan dini).
- Melaksanakan pelatihan dan simulasi yang melibatkan masyarakat setempat.

## **F. Pengelolaan Kawasan Khusus**

Untuk Tahun Anggaran 2009, di Kabupaten Bone belum ada penetapan kawasan khusus oleh Pemerintah Daerah berdasarkan aturan yang berlaku.

## **G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

### 1. Gangguan yang terjadi

Gangguan yang terjadi selama tahun 2009 adalah sebagai berikut :

#### a. Demonstrasi Relokasi Pasar Sentral

Demonstrasi yang dilakukan oleh perwakilan pedagang pasar sentral baru terhadap Pasar Mini Mandiri.

#### b. Balapan Liar selama Ramadhan

Maraknya balapan liar disejumlah titik ruas jalan dan kompleks perumahan yang mengganggu pelaksanaan ibadah dan kenyamanan serta keamanan masyarakat.

#### c. Tindakan Amoral selama Bulan Ramadhan

Maraknya tindakan amoral selama bulan ramadhan sangat meresahkan warga. Tempat-tempat yang gelap dan sepi sering digunakan pasangan-pasangan mesum.

d. Pelanggaran Perda dan Keputusan Bupati

Pelanggaran Perda dan Keputusan Bupati yang terjadi meliputi, maraknya penjualan minuman keras, dan pedagang yang masih menjual di eks pasar Sentral Watampone.

## H. HAL-HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU UNTUK DILAPORKAN

1. Penghargaan di bidang Penghargaan Anugrah Aksara
2. Pelaksanaan Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis yang sudah berlangsung sejak tahun 2008.
3. Piala Adipura Untuk Kategori Kota Sedang
4. Meraih penghargaan berupa Piala Wahana Tata Nugraha
5. Pada tahun 2009 pemerintah Kabupaten Bone ditetapkan sebagai Kabupaten yang memiliki kinerja terbaik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik tingkat propinsi dan penghargaan "**Citra Bhakti Abdi Negara**" dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
6. Penghargaan "**Adibakti Mina Bahari**" dari Menteri Kelautan Dan Perikanan sebagai juara III (tiga) Tingkat Nasional Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di bidang pelestarian lingkungan sumber daya ikan.
7. Juara I (satu) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dibidang Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
8. Penganugerahan **Satya Lencana Pembangunan Pertanian** di bidang Peningkatan Produksi Beras Nasional.

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Kami selaku penyelenggara pemerintahan, menyadari bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2009 belum bisa memuaskan semua pihak/stakeholder dan masih banyak yang perlu kita perbaiki bersama. Untuk itu, kami pun membuka hati untuk menerima kritik, saran, serta masukan yang konstruktif dari semua pihak. Kami yakin dan berharap bahwa dengan kebersamaan yang terus kita bangun, Kabupaten Bone akan lebih baik dari masa lalu dan mampu memenuhi aspirasi masyarakat di masa yang akan datang.

Akhirnya, kunci untuk mencapai keberhasilan tersebut adalah: mutlak perlu adanya komitmen yang kuat dan konsistensi semua pihak, baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Pusat, didukung dengan semangat kebersamaan seluruh komponen masyarakat. Dengan dilaksanakannya kunci tersebut maka kita boleh yakin bahwa masa depan Kab. Bone yang BERADAT akan bisa kita wujudkan.

**BUPATI BONE,**

**H. A. MUH. IDRIS GALIGO, S. H.**